

A COMPULSION TO WAIVE THE DIPLOMATIC IMMUNITY IN ORDER TO EXERCISE THE JURISDICTION OF THE RECEIVING STATE

Iftitahsari^{*}

Abstract

Diplomatic immunity is not given to personal benefit for diplomatic agent, but this immunity would make sure that diplomatic agent could run their duties and functions well without any disruption in the receiving state. There are three types of diplomatic immunity given to diplomatic agent: immunity of the status personal, immunity of the diplomatic bag, and immunity of the premises. But in fact, there are so many cases illustrated how the diplomatic agent abused their diplomatic immunity in all that types. The cases is frequently about murder, narcotics, assault, rape, and so many others. Sometimes this incidents make a such bad effect for the relationship between the sending state and the receiving state. Vienna Convention on the Diplomatic Relations 1961 has a few alternative remedies to solve this problem. There are waiver of diplomatic immunity, declare persona non grata, and terminate the diplomatic relation with the state, but this thesis just discussed about the waiver of diplomatic immunity, especially why the sending state must waive the diplomatic immunity when the receiving state ask to. Because there is often an objection or rejected from the receiving state to waive the diplomatic immunity, so the sending state could not exercise its jurisdiction to the diplomatic agent who commit a crime or abusement.

* Candidate for Bachelor Degree of Law (Sarjana Hukum), 2015, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

**KEHARUSAN UNTUK MENANGGALKAN HAK KEKEBALAN
DIPLOMATIK DALAM RANGKA MELAKSANAKAN YURISDIKSI
NEGARA PENERIMA**

Intisari

Hak kekebalan diplomatik tidaklah diberikan untuk kepentingan pribadi diri pejabat diplomatik namun untuk menjamin bahwa mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik saat berada di negara penerima. Terdapat tiga jenis hak kekebalan yang diberikan kepada pejabat diplomatik yaitu hak kekebalan terhadap diri pribadi, kantong atau dokumen diplomatik, dan kantor perwakilan diplomatik. Namun nyatanya dalam praktik banyak sekali ditemukan kasus-kasus yang menggambarkan bagaimana hak kekebalan diplomatik ini disalahgunakan oleh pejabat diplomatik yang bersangkutan dalam berbagai macam pelanggaran. Hal-hal yang sering terjadi misalnya adalah pembunuhan, narkoba, penganiayaan, perkosaan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan terkadang dengan adanya insiden ini kerap membuat hubungan antara negara pengirim dan negara penerima menjadi retak. Vienna Convention on the Diplomatik Relations 1961 mempunyai beberapa alternatif penyelesaian untuk masalah ini, yaitu diantaranya adalah melalui penanggalan hak kekebalan diplomatik, pemberian deklarasi persona non grata, dan pemutusan hubungan diplomatik. Akan tetapi dalam tulisan ini hanya akan dibahas mengenai penanggalan hak kekebalan diplomatik, khususnya mengenai hal-hal apa saja yang membuat suatu penanggalan hak kekebalan diplomatik harus dilakukan oleh negara pengirim. Sebab tidak jarang pula permintaan dari negara penerima untuk menanggalkan hak kekebalan diplomatik ini ditolak oleh negara pengirim sehingga negara penerima tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap seorang pejabat diplomatik yang melakukan kejahatan atau pelanggaran.